

## Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Aksi	K/L Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan 2016	Ukuran Keberhasilan 2017
<b>Rencana Aksi Nasional</b>			
1. Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka	Kementerian PPN/ Bappenas (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia)	1. Tersedianya rancangan Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia 2. Tersedianya rancangan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka	1. Tersedianya Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia 2. Tersedianya Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka
2. Penyusunan himbuan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan konsultasi publik secara rutin di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan sebagai realisasi UU 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya SE Menpan dan Aturan Teknis bagi semua K/L untuk melakukan konsultasi publik	70% prosentase Kementerian/ Lembaga melaksanakan Forum Konsultasi Publik
3. Penyusunan panduan tata kelola yang baik (manual governance) dan pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai upaya mewujudkan pencapaian target-target Tujuan	Kementerian PPN/ Bappenas	1. Terbitnya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mempertimbangkan aspek partisipasi publik yang lebih	1. Terlaksananya proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) yang inklusif; 2. Terbangunnya platform

<p>Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang lebih partisipatif</p>		<p>berkualitas dengan menempatkan perwakilan non pemerintah setara dengan perwakilan pemerintah dalam pengelolaan SDGs di tingkat nasional maupun daerah. 2. Terbitnya pedoman partisipasi publik dalam pelaksanaan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)</p>	<p>komunikasi digital Sekretariat SDGs yang memungkinkan publik berkontribusi aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Renaksi SDGs (misal: <i>public consultation dashboard</i>, fitur polling masyarakat terhadap pelaksanaan SDGs)</p>
<p>4. Peningkatan partisipasi publik di dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial</p>	<p>Badan Informasi Geospasial</p>	<p>Tersedianya rancangan standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.</p>	<p>1. Ditetapkannya standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; 2. Dilaksanakannya sosialisasi standar acuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial.</p>
<p>5. Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI</p>	<p>Ombudsman RI</p>	<p>Pengembangan desain <i>online tracking system</i></p>	<p>Aktifnya <i>online tracking system</i></p>

<p>6. Peningkatan kredibilitas Ombudsman RI sebagai otoritas nasional pemantau kualitas pelayanan publik</p>	<p>Ombudsman RI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016;</li> <li>2. Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2016.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat setiap 6 bulan untuk tahun 2017;</li> <li>2. Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2017.</li> </ol>
<p>7. Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No 25/ 2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Ditindaklanjutinya 100% rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup perbaikan di 3 produk layanan di bawah Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);</li> <li>2. Sertifikasi Guru:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan calon peserta sertifikasi guru</li> <li>b. Proses Tunjangan Profesi</li> </ol> </li> </ol>	<p>Tercapainya 100% pelayanan publik yang sesuai dengan indikator zona hijau ORI.</p>

		<p>Guru PNS Daerah</p> <p>c. Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan penyaluran tunjangan profesi NON PNS.</p> <p>3. Izin pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan izin pendirian sekolah PAUD</p>	
<p>8. Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No 25/ 2009 tentang pelayanan publik Kementerian Agama</p>	<p>Kementerian Agama</p>	<p>Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 (70% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji)</li> <li>2. Permohonan Izin</li> </ol>	<p>Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2016 (100% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji)</li> <li>2. Permohonan Izin Perpanjangan</li> </ol>

		<p>Perpanjangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)</li> <li>4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan)</li> <li>5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> </ol>	<p>Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)</li> <li>4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan)</li> <li>5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> <li>9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum &amp; KLN)</li> </ol>
--	--	--	---

<p>9. Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI</p>	<p>Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama;</li> <li>2. Tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB</li> </ol>	<p>Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N untuk tahun 2017</li> <li>2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB untuk tahun 2017</li> </ol>
<p>10. Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>50% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N</p>	<p>100% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N</p>
<p>11. Terjalannya kerjasama antara KemenPANRB, KSP, ORI dan Kominfo untuk memanfaatkan</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara</p>	<p>1. Penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online dalam</p>	<p>1. Tersedianya data aspirasi dan apresiasi publik;</p>

<p>LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online</p>	<p>dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>	<p>bentuk Nota Kesepahaman Bersama; 2. Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP, Ombudsman RI dan Kominfo sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama</p>	<p>2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP, Ombudsman RI dan Kominfo tentang penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online</p>
<p>12. Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via Lapor! menjadi 1juta aduan untuk 2016 (target agregat; jumlah pengaduan per 27 Juni 2016: 827,977 pengaduan; jumlah pengguna LAPOR per 27 Juni 2016: 420,348)</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden</p>	<p>1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1 juta aduan 2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 800 ribu pengguna</p>	<p>1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1,4 juta aduan 2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 1 juta pengguna</p>
<p>13. Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!</p>	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI</p>	<p>50% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti</p>	<p>75% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti</p>

<p>14. Meningkatkan keterhubungan lebih banyak BUMN ke LAPOR!</p>	<p>Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</p>	<p>Sebanyak 118 BUMN sudah terhubung dengan LAPOR! (100%)</p>	<p>100% laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh BUMN</p>
<p>15. Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Pengembangan sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beroperasinya sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sistem LAPOR</li> </ol>
<p>16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, &amp; Responsif</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)</p>		<p>Terfasilitasinya 30 desa terpilih sebagai desa pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya laporan singkat keadaan desa sebelum dilaksanakannya proyek percontohan pemerintahan desa</li> <li>2. Tersusunnya petunjuk teknis</li> </ol>

			<p>tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersosialisasikannya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;</li> <li>4. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif, partisipatif dan terbuka;</li> <li>5. Terlaksananya bimbingan teknis tata cara pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;</li> <li>6. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan sistem informasi keuangan desa dan aset desa.</li> <li>7. Terfasilitasinya penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa serta</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>penerapan sistem informasi keuangan desa</p> <p>8. Terfasilitasinya penyusunan Perbup/Perwalkot tentang perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>9. Terfasilitasinya publikasi rencana kegiatan pembangunan desa dan penganggaran desa di balai desa/ataupun di tempat-tempat umum di desa;</p> <p>10. Tersedianya laporan implementasi proyek percontohan pemerintahan desa terbuka untuk tahun 2017</p> <p>Target lokasi di 3 Provinsi, 6 Kabupaten/Kota, 30 desa di Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumatera Barat: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto</li> <li>2. Maluku: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara</li> <li>3. Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten</li> </ol>
--	--	--	---

<p>17. Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan</p>	<p>Kementerian Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes</li> <li>2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan <i>performance</i> konten komunikasi digital <a href="http://www.kemkes.go.id">http://www.kemkes.go.id</a> dengan target: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun</li> <li>▪ Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)</li> </ul> </li> <li>3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun;</li> <li>4. Inventarisasi seluruh kanal informasi digital Kemenkes dan pembersihan kanal informasi yang sudah tidak lagi aktif digunakan</li> <li>5. Dapat diakses dan</li> </ol>	<p>Karanganyar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes</li> <li>2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan <i>performance</i> konten komunikasi digital <a href="http://www.kemkes.go.id">http://www.kemkes.go.id</a> dengan target: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun</li> <li>▪ Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)</li> </ul> </li> <li>3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun;</li> <li>4. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <a href="http://www.kemkes.go.id">http://www.kemkes.go.id</a></li> <li>5. Tersedianya konten informasi</li> </ol>
--	------------------------------	---	--

		<p>berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <a href="http://www.kemkes.go.id">http://www.kemkes.go.id</a>;</p> <p>6. Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <a href="http://kemkes.go.id">http://kemkes.go.id</a>.</p>	<p>edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <a href="http://kemkes.go.id">http://kemkes.go.id</a>.</p>
<p>18. Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi Kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital);</p> <p>2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance <a href="http://www.kemdikbud.go.id">http://www.kemdikbud.go.id</a> dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 7% per-tahun</li> <li>▪ Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 7% per-tahun (Konten Komunikasi Digital)</li> </ul> <p>3. Peningkatan jumlah khalayak</p>	<p>1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital);</p> <p>2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital di <a href="http://www.kemdikbud.go.id">http://www.kemdikbud.go.id</a> dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah pengunjung wesite sebesar 10% per-tahun</li> <li>▪ Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 10% per-tahun (Konten Komunikasi Digital)</li> </ul> <p>3. Peningkatan jumlah khalayak</p>

		<p>sasaran (followers dan like page) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun;</p> <p>4. Inventarisasi &amp; verifikasi akun media sosial resmi Kemdikbud, dan me-non aktifkan yang sudah tidak lagi aktif digunakan;</p> <p>5. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <a href="http://www.kemdikbud.go.id">http://www.kemdikbud.go.id</a>;</p> <p>6. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <a href="http://kemdikbud.go.id">http://kemdikbud.go.id</a> dan juga melalui media sosial kemendikbud.</p>	<p>sasaran (followers dan like fanpage) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun;</p> <p>4. Peningkatan konten bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipublikasikan secara periodik per-bulan melalui akun media sosial Kemdikbud sebesar 15% per-tahun;</p> <p>5. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <a href="http://www.kemdikbud.go.id">http://www.kemdikbud.go.id</a> dan juga melalui media sosial kemendikbud.</p>
<p>19. Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik</p>	<p>Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p>	<p>Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui "<i>public awareness campaign</i>" tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:</p>	<p>Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui "<i>public awareness campaign</i>" tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:</p> <p>1. Meningkatkan jumlah informasi</p>

<p>yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Daftar Informasi Publik;</li> <li>2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengunjung per Desember 2015</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengikut per Desember 2015</li> </ol>	<p>publik yang tersedia dalam situs pelayanan informasi sebanyak 25% dari total DIP per Desember 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengunjung per Desember 2015;</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengikut per Desember 2015</li> </ol>
<p>20. Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri</p>	<p>Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik</li> <li>2. Implementasi <i>pilot project</i> penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri di 5 PTN (1 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) sebagai pelaksanaan dari Permenristekdikti terkait Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristek Dikti</li> </ol>	<p>100 % PTN sudah memahami dan menjalankan ketentuan Permenristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Kerja)</p>

<p>21. Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran</p>	<p>Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran)</p>	<p>Terbentuknya portal data anggaran sesuai Perpres Rincian APBN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat tautan portal data anggaran pada halaman muka web kemenkeu.go.id dan portal data nasional data.go.id;</li> <li>2. Portal data anggaran akan ditautkan dengan portal data dari minimal 6 K/L yang memiliki tupoksi layanan dasar vital (PUPERA, Kesehatan, Diknas, Ristekdikti, Sosial, Kemenhub, dan Bappenas)</li> </ol>
<p>22. Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah</p>	<p>Kantor Staf Presiden dan Bappenas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Peraturan Presiden terkait Kebijakan Satu Data;</li> <li>2. Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ESDM</li> <li>b. Kementerian Kesehatan</li> <li>c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian Ristek Dikti</li> <li>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>f. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>g. Kementerian PPN/ Bappenas</li> </ol> </li> </ol>	<p>Terlaksananya Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ESDM</li> <li>b. Kementerian Kesehatan</li> <li>c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>d. Kementerian Ristek Dikti</li> <li>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>f. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>g. Kementerian PPN/ Bappenas</li> </ol>

<b>Rencana Aksi Daerah</b>			
<b>Pemerintah Kota Banda Aceh</b>			
23. Implementasi Open Data	Bappeda, Dishubkominfo	Terintegrasinya data dari 20 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)	Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)
24. Penguatan kanal pengaduan pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan, Dishubkominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasinya 2 (dua) saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (lpm.bandaacehkota.go.id dan suwarga.bandaacehkota.go.id) dengan LAPOR!-SP4N;</li> <li>2. Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N;</li> <li>3. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)</li> <li>2. Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih</li> </ol>

		secara berkala terhadap tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk	
25. Peningkatan keterbukaan informasi Gampong (desa)	BPM, Dishubkominfo	4. Penetapan Perbub terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/ Kelurahan; 5. Terpublikasikannya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 20 desa terpilih	
<b>Pemerintah Kota Bandung</b>			
26. Peningkatan jumlah data terbuka	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Tersedianya 1,000 berkas/ file data di portal data Kota Bandung	Tersedianya 1,500 berkas/ file data di portal data Kota Bandung
27. Penguatan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD)	1. Tersedianya informasi standar layanan 75% SKPD secara lengkap dan termutakhirkan pada <a href="http://standarpelayanan.bandung.go.id">http://standarpelayanan.bandung.go.id</a> ; 2. Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di	1. Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan termutakhirkan berdasarkan SOTK baru; 2. Penambahan fitur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat; 3. Persentase SKPD dengan nilai

		zona hijau sebanyak 65%	standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%
28. Transparansi Sistem Anggaran Daerah	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung <a href="http://ppid.bandung.go.id">http://ppid.bandung.go.id</a>;</li> <li>2. Terpublikasikannya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN <a href="http://sabilulungan.bandung.go.id">http://sabilulungan.bandung.go.id</a> melalui tahapan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat dapat mengakses proses pengajuan hibah dan bansos sampai dengan daftar nominatif calon penerima hibah dan bansos</li> <li>b. Terbukanya informasi nilai proposal yang diajukan dan yang disetujui</li> <li>c. Masyarakat dapat mengetahui rincian rencana penggunaan yang diajukan dengan yang</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya penerapan sistem e-budgeting di pemerintahan Kota Bandung melalui web PPID Kota Bandung;</li> <li>2. Pemuktahiran data dan aplikasi SABILULUNGAN melalui tahapan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat dapat mengakses realisasi penyaluran berdasarkan SP2D sehingga mengetahui dana tersebut sudah diterima oleh penerima dan kegiatan hibah dan bansos sedang / sudah berjalan</li> <li>b. Adanya menu tracking proses sejak pengusulan sampai dengan pencairan dana hibah dan bansos</li> <li>c. Adanya fitur pengumuman sebagai kemudahan akses informasi kepada penerima hibah dan bansos terkait kewajiban untuk : (i) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban</li> </ol> </li> </ol>

		<p>disetujui sehingga memahami dan mengetahui hasil verifikasi</p> <p>d. Terbukanya informasi maksud dan tujuan penggunaan dana hibah, bank dan rekening penerima hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</p> <p>e. Adanya menu peraturan untuk mengetahui perubahan atas peraturan yang berlaku sehingga masyarakat memahami mekanisme hibah dan bansos</p>	<p>penggunaan dana hibah bansos; (ii) Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos serta informasi lainnya.</p>
<p>29. Penguatan keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan di Pemerintah Kota Bandung</p>	<p>Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)</p>	<p>1. Integrasi Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) Kota Bandung  <a href="http://birms.bandung.go.id">http://birms.bandung.go.id</a>                  dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di LKPP;</p>	<p>1. Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola e-purchasing (e-catalogue);</p> <p>2. Integrasi dengan sistem e-budgeting</p>

		2. Integrasi BIRMS dengan SIMDA keuangan di DPKAD	
30. Penguatan aplikasi LAPOR!	Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA	Terhubungnya seluruh kanal/ aplikasi pengaduan publik dengan aplikasi LAPOR!-SP4N sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi LAPOR!-SP4N	Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik
31. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan publik Kota Bandung			Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR!
32. Meningkatnya keterbukaan informasi usulan-usulan masyarakat kepada Anggota DPRD dari hasil reses		Terpublikasikannya usulan-usulan masyarakat kepada anggota DPRD dari hasil reses melalui aplikasi e-Reses <a href="http://bappeda.bandung.go.id/res es">http://bappeda.bandung.go.id/res es</a>	
33. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan		Sosialisasi pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 54 SMPN	1. Pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN

			2. Sosialisasi dan bimtek PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN
<b>Pemerintah Kota Semarang</b>			
34. Penyusunan regulasi terkait tata kelola data Pemkot Semarang yang sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assessment Kondisi Tata Kelola Data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba</li> <li>2. Tersedianya Raperwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang.</li> </ol>	Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang
35. Pembangunan satu basis data Pemkot Semarang yang up-to-date, terintegrasi, dan akurat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya 5 dataset pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang</li> <li>2. Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba</li> <li>3. Kajian pengelolaan Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang</li> <li>2. Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba</li> <li>3. Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang</li> <li>4. Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu</li> </ol>

			Data Nasional
36. Penguatan keterbukaan informasi publik	Asisten III, Bagian Humas dan PPID SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kajian revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;</li> <li>2. Tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) di SKPD dan BUMD yang telah dilakukan uji konsekuensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;</li> <li>2. Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website <a href="http://semarangkota.go.id">semarangkota.go.id</a>. Terupdate</li> </ol>
37. Mendorong dan mengajak partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan Pemkot Semarang	Inspektorat, Asisten III dan Bagian Organisasi, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasinya 2 saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang (P3M dan Lapor Hendi) dengan LAPOR!-SP4N</li> <li>2. Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai Surat Edaran MenPANRB No 4/ 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N.</li> <li>3. Tersedianya laporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang;</li> <li>2. Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD</li> <li>3. Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017</li> <li>4. Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi</li> </ol>

		<p>pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk untuk 2016</p> <p>4. Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi</p>	<p>5. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)</p>
<p>38. "Penguatan akses informasi publik mengenai kelembagaan DPRD dan kegiatan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan mandat UU KIP.</p>	<p>DPRD dan Setwan</p>	<p>1. Terkumpulnya seluruh data di bawah kewenangan DPRD dengan dikoordinasi PPID/PPID Pembantu</p> <p>2. Adanya konsep pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk DPRD</p>	<p>1. Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda.</p> <p>2. Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitasi kedewanan</p>
<p>39. Peningkatan tata kelola data dan informasi di bawah kewenangan DPRD</p>		<p>Terpublikasikannya data kelembagaan yang meliputi: organisasi, tupoksi, mekanisme kerja DPRD, profil anggota DPRD dan profil sekjen, serta jadwal kegiatan DPRD yang dapat diakses secara daring</p>	<p>Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun</p>

<b>Pemerintah Kabupaten Bojonegoro</b>			
40. Revolusi data	Dinas Kominfo (Koordinator), Bappeda, BPMPD, Camat, Kepala Desa/ Lurah, TP-PKK Kab.; NGO BI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlatihnya Kader dasawisma PKK untuk inputing data (tiap desa/ kelurahan 2 orang);</li> <li>2. Terlaksananya proses inputing pada aplikasi data dasawisma untuk seluruh desa/kelurahan (430 desa/ kelurahan) di Kabupaten Bojonegoro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terverifikasinya data hasil input kader dasa wisma PKK sebagai data tunggal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>2. Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data dasa wisma;</li> <li>3. Terinputkannya data bojonegoro pada portal data nasional data.go.id</li> </ol>
41. Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa	BPMPD (Koordinator), Dinas Kominfo, Bag. Pemerintahan, Camat, Kepala Desa, NGO BI, IDFoS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya APBDes dan Laporan pertanggungjawaban berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho;\</li> <li>2. Tersusunnya Indeks Keterbukaan Pemerintahan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya APBDes, Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%) , webdes (70%);</li> <li>2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa;</li> <li>3. Pendampingan pembentukan desk Layanan Informasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa</li> </ol>

<p>42. Peningkatan transparansi anggaran daerah dan open data kontrak</p>	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (untuk Anggaran); Dinas Pekerjaan Umum (untuk kontrak)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya ringkasan APBD Kab. Bojonegoro melalui web BPKKD berbasis keterbukaan informasi public</li> <li>2. Terbangunnya aplikasi sistem keterbukaan data kontrak pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro</li> <li>3. Ditetapkannya peraturan Bupati tentang keterbukaan dokumen kontrak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpublikasikannya hasil perencanaan pembangunan pada fase RKPD, KUA-PPAS pada web Bappeda</li> <li>2. Terpublikasikannya rincian APBD, Kab. Bojonegoro pada masing-masing SKPD melalui web SKPD/ PPID SKPD</li> <li>3. Terimplementasikannya proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi sistem keterbukaan data kontrak pengadaan barang dan jasa (open data contract standard)</li> </ol>
<p>43. Penguatan praktek pemerintah terbuka yang berkelanjutan</p>	<p>Dinas Kominfo (Koordinator), Sekwan, Bag Pemerintahan, NGO BI, PRC</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah terkait manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik (Keterbukaan Informasi Publik)</li> <li>2. Terhubungkannya seluruh kanal/ aplikasi pengaduan publik dengan Aplikasi LAPOR!-SP4N sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya Peraturan Daerah terkait manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik (Keterbukaan Informasi Publik)</li> <li>2. Sosialisasi Peraturan Daerah terkait manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik (Keterbukaan Informasi Publik) dan perumusan dan penetapan SOP di SKPD</li> <li>3. Pengembangan dan pemanfaatan dashboard</li> </ol>

		secara Nasional bagi Pemerintah Daerah kedalam Aplikasi LAPOR!-SP4N.	LAPOR! Sebagai hub aplikasi pengaduan publik
44. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Ortala (Koordinator), Dinas Kesehatan, Badan Perizinan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, RSUD, Camat, Kepala Sekolah, Kepala UPTD Puskesmas, NGO IDFoS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya Kepuasan Masyarakat di bidang Kesehatan (Layanan semua RSUD dan 2 Puskesmas), Pendidikan (transparansi Sekolah SD, SMP, SMA, SMK masing-masing 1), Perizinan dan Infrastruktur (indeks = 67/ zona hijau);</li> <li>2. Tersusunnya maklumat pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga masyarakat berbasis sistem informasi tehnologi di Puskesmas Gayam dan Kalitidu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya Kepuasan Masyarakat di bidang Kesehatan (Layanan semua RSUD dan 2 Puskesmas), Pendidikan (transparansi Sekolah SD, SMP, SMA, SMK masing-masing 1), Perizinan dan Infrastruktur (indeks = 70/ zona hijau)</li> <li>2. Terimplementasikannya pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga masyarakat berbasis sistem informasi tehnologi di Puskesmas Gayam dan Kalitidu</li> </ol>
<b>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</b>			
45. Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sosialisasi Revisi Pergub PPID tentang Layanan Informasi Publik Nomor 48 Tahun 2013</li> <li>2. Terbentuknya PPID Provinsi</li> <li>3. Terlaksananya Pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota</li> </ol>

		website PPID Provinsi	Administrasi 2. Terklasifikasinya informasi di seluruh website SKPD berdomain jakarta.go.id
46. Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)</li> <li>2. Terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!)</li> </ol>	Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)
47. Penguatan Tata Kelola Data	BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya 1000 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)</li> <li>2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (85%)</li> <li>3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 51 instansi menjadi 57 instansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)</li> <li>2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (90%)</li> <li>3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 57 instansi menjadi 101 instansi</li> </ol>

<p>48. Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan</p>	<p>BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rembuk RW secara online melalui aplikasi e-Musrenbang di seluruh RW</li> <li>2. Tersedianya kanal usulan langsung masyarakat pada sistem e-Musrenbang</li> <li>3. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada fase RKPD, KUA-PPAS, penyampaian KUA-PPAS, RAPBD dan APBD pada sistem e-Budgeting (apbd.jakarta.go.id)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fitur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang</li> <li>2. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada tiap tahapan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat</li> </ol>
---	---	--	---